KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 2, 2018: 150-162

DILEMA TROTOAR

Studi Kasus Dampak Pembangunan Trotoar terhadap Pedagang Kaki Lima di Salatiga

Amos Mario Khosasi
Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: amos.mario42@gmail.com

Dita Mawar Kusumaningtyas
Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana

Theodore Halsted
Program Studi S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana

Gatot Sasongko
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
Email: gatot.sasongko@uksw.edu

Abstract

The existence of street vendors can reduce the burden of government in overcoming unemployment. Due to the existence of street vendors, can absorb labor that can not be accommodated by the formal sector. But on the other hand, the presence of street vendors often disrupt the activities in the public sphere area such as sidewalks. Therefore, the government of Salatiga City made a policy by improving the function of the sidewalk and sterilize it to be enjoyed again by pedestrians. But with the sterilization, the impact also to the street vendors, which they should move. The purpose of this study is to determine the impact caused by the construction of the sidewalk to the income level of street vendors. In conducting this research, we conducted interviews with several street vendors who are still actively selling. Among other things, soto traders,chicken noodles, and leker. The results showed that the impact of pavement development had a negative impact on the income level of street vendors. Also found obstacles that arise after the street vendors are moving places, such as infrastructure facilities are not met, inadequate facilities, and reduced visitors who come.

Keywords : *Construction of sidewalks, street vendors, impacts.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Urbanisasi mengakibatkan jumlah penduduk di suatu kota bertambah. Ada beberapa alasan orang melakukan urbanisasi harapan dapat mengubah nasib dan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Meskipun demikian, seringkali pertambahan penduduk ini tidak diiringi dengan pertambahan lapangan pekerjaan. Akibatnya, pengangguran di perkotaan meningkat. Selain itu, karena para pendatang harus bertahan hidup dan bekerja, maka sektor informal menjadi salah satu alternatif utama yang dapat dikerjakan oleh para pendatang, terlebih bagi pendatang tanpa modal keterampilan.

Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang juga banyak didatangi oleh para urban maupun transmigran. Kebanyakan dari urban dan transmigran ini melakukan urbanisasi dan transmigrasi ke Kota Salatiga karena Universitas dan Sekolah Tinggi. Setidaknya tercatat 186.420 penduduk di Kota Salatiga yang hanya memiliki luas 56,78 Km². Banyaknya transmigran dan urban yang bertujuan mengubah nasib tetapi tidak memiliki keterampilan kemudian mengakibatkan pengangguran di Kota Salatiga meningkat. Dimana terjadi pertambahan jumlah angkatan kerja sekitar 2.554 tiap tahunnya, tetapi tidak diikuti dengan pertambahan lapangan pekerjaan. Kebutuhan para transmigran dan urban ini memerlukan pekerjaan untuk bertahan hidup maka sektor informal menjadi pilihan paling tepat bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan. Ada setidaknya 3 jenis usaha di Kota Salatiga, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),usaha kecil rumahan, dan sektor informal.

Salah satu usaha dalam sektor informal yang paling banyak pemilik usahanya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Para PKL biasanya berjualan menggunakan gerobak, membawa etalase di atas sepeda motor atau bahkan membuka tenda di atas trotoar jalan. Para PKL di Kota Salatiga tersebar biasanya di sekitar sekolah-sekolah, tempat-tempat umum seperti rumah sakit dan taman kota, serta universitas, termasuk berada di luar Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Para PKL membaca peluang bahwa ada kurang lebih 31.000 civitas akademika yang sehari-hari belajar dan memerlukan makanan atau kebutuhan lain tetapi merasa terlalu jauh untuk berjalan ke area kemiri di belakang kampus UKSW. Demikianlah, para PKL ini menciptakan penawaran untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan siswa di SMP Stella Matutina Salatiga. Para PKL ini menawarkan barang dan jasanya di depan UKSW tepat setelah pintu gerbang dimana mereka memanfaatkan area trotoar pejalan kaki sebagai tempat bertransaksi mereka.

Mulai dari tahun 1997 beberapa pedagang bahkan mendirikan tenda bongkar pasang untuk melayani permintaan mahasiswa UKSW. Hal ini bukan tanpa alasan, di samping penggunaan trotoar yang salah, pemerintah Kota Salatiga sudah membuat peraturan mengenai penggunaan fasilitas publik seperti trotoar ini dalam Peraturan Pemerintah Kota Salatiga Nomor 5 tahun 2011. Namun karena rendahnya pengawasan pemerintah dan pemberian sanksi yang tidak tegas membuat para PKL ini tetap menawarkan barang dan jasanya di area trotoar depan kampus UKSW. Tidak dilakukannya inspeksi oleh para petugas pemerintahan sehingga 21 tahun berdagang di area kampus UKSW para pedagang kaki lima sangat jarang menerima teguran. Dalam kasus ini ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan, pentingnya pemerintah menata wajah Kota Salatiga untuk lebih cantik lagi dan sebagai pemenuhan kebutuhan fasilitas publik bagi warga Kota Salatiga beriringan juga dengan pentingnya keberadaan para PKL di depan kampus UKSW Salatiga sebagai untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan siswa yang ada di sekitar kampus UKSW Salatiga. Ada perbedaan kebutuhan yang keduanya sama-sama penting. Namun di sisi lain terjadi kesalahan perilaku yang menggunakan trotoar yang seharusnya tempat bagi para pejalan kaki sebagai tempat untuk membentuk pasar.

Penelitian Terdahulu

Trotoar pada dasarnya memiliki fungsi sebagai sarana bagi masyarakat melakukan mobilitasnya (berjalan kaki) dengan nyaman dan aman kini beralih fungsi menjadi tempat yang nyaman bagi para PKL sebagai tempat yang tempat untuk mempromosikan segala dagangannya. Entah berupa barang siap jadi maupun souvenir-souvenir yang menarik. Mengacu pada fungsi trotoar dalam Perencanaan Trotoar oleh Departemen Pekerjaan Umum (1990) adalah, berikut: Untuk jalur transportasi bagi pejalan kaki agar selamat dan merasa nyaman dalam transportasinya, Untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki, Untuk memberikan ruang di bawah trotoar sebagai tempat utilitas kelengkapan jalan seperti saluran air buangan muka jalan, penempatan rambu lalu lintas dan lain-lain.

Namun realita yang ada fungsi ketiga trotoar ini sudah tidak lagi berjalan dengan baik. Digantikan dengan penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan, tempat melakukan kegiatan perekonomian dan mempromosikan barang serta jasa yang di produksi. Ada beberapa hal yang dihasilkan dari beberapa jurnal yang sudah dibaca penulis. Ketiga jurnal ini sepakat bahwa alih fungsi trotoar menjadi hal yang umum dan hal ini sudah mengakar seolah-olah trotoar memang tempat berjualan. Namun ada beberapa perbedaan yang dapat dilihat. Di jurnal yang ditulis oleh Aji Wahyu Heriyanto (2012) disebutkan bahwa keuntungan yang didapat ketika berjualan di trotoar tidak lebih banyak ketika berjualan di lokasi

yang sudah ditetapkan pemerintah. Para PKL merasa dengan adanya relokasi ke tempat yang disediakan pemerintah memberikan dampak yang baik

Selain kenaikan pendapatan, kenyamanan dan keamanan menjadi hal yang begitu menguntungkan. Permasalahan yang di dapat hanya minimnya prasarana yang ada seperti MCK dan kurangnya lahan parkir. Namun secara keseluruhan para PKL merasa diuntungkan dengan adanya relokasi yang meninggalkan trotoar sebagai tempat berjualan. Namun berbeda dengan kedua jurnal yang lain, Dinarjati Eka Puspitasari (2009) dan Suryantika Sinaga (2004) menjelaskan bahwa besarnya keuntungan yang didapatkan dan kenyamanan pelanggan tetap yang ada membuat para PKL enggan 'menyucikan' trotoar sebagai tempat bagi pejalan kaki. Hal ini menunjukkan adanya *trade off* antara meninggalkan trotoar atau menetap untuk proses perekonomian para PKL. Namun di 2 jurnal disebutkan bahwa peningkatan jumlah PKL ketika di relokasi meningkat sekitar 20%. Hal ini berarti sebenarnya para PKL sudah sadar dan mengerti mengenai kesalahan mereka menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Namun ketidakpastian mengenai perbaikan nasib setelah direlokasikan yang membuat mereka enggan meninggalkan trotoar. Terlebih bila tidak adanya relokasi dari pemerintah bagi para pedagang kaki lima.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, ditemukan adanya informasi asimetris antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Kota Salatiga. Kemudian terdapat perbedaan pandangan mengenai pembangunan trotoar di depan kampus UKSW serta terdapat perubahan pendapatan pedagang kaki lima sebagai akibat dari pembangunan trotoar di depan kampus UKSW. Maka tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui dampak dari dibangunnya trotoar bagi para pedagang kaki lima dan mengetahui perubahan pendapatan para pedagang kaki lima setelah dibangunnya trotoar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan penjelasan bagi pembaca mengenai dampak yang terjadi akibat relokasi pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di trotoar. Kemudian diharapkan juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa dan menjadi bahan bagi pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima ke tempat yang lebih baik dan tidak menurunkan pendapatan para pedagang kaki lima.

KAJIAN PUSTAKA

Trotoar

Trotoar sebagai lajur untuk pejalan kaki saat ini mulai berubah fungsi menjadi tempat untuk kegiatan yang lain (Ambarwati et al, 2006). Selain itu sesuai

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa trotoar termasuk salah satu fasilitas pendukung yang digunakan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.Dinarjati Eka Puspitasari di dalam jurnalnya yang berjudul Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman (2010) menyebutkan trotoar sebagai ruang publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Trotoar juga dapat digunakan sebagai jalur strategis untuk mendukung keindahan kota (Rahayu et al, 2018). Seiring dengan berkembangnya jaman dan kepentingan, trotoar sebagai *pedestrian ways* tidak lagi memberikan rasa aman dan nyaman karena pejalan kaki harus berebut ruang gerak dengan pengguna trotoar lain yang tidak seharusnya menggunakan trotoar (Setiyawan et al, 2020). Trotoar sebagai jalur yang dibuat dengan tujuan memberi rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki kini mulai beralih fungsi sebagai tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bahkan sebagai lahan parkir yang semakin meresahkan tidak hanya untuk pejalan kaki namun juga pemerintah kota.

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu alternatif sektor informal yang paling digemari dan keberadaanya di berbagai kota semakin banyak dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan dan tingginya pertumbuhan penduduk, sehingga PKL menjadi pilihan yang tepat bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya (Heriyanto, 2012). PKL termasuk di dalam jenis usaha kecil yang seharusnya berkembang tanpa mengganggu kelangsungan kegiatan dan kepentingan publik sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha Kecil (Prasetya et al, 2016). Walaupun di satu sisi keberadaan PKL harus disadari menimbulkan permasalahan kota dan penyalahgunaan trotoar namun tidak dapat dipungkiri bahwa PKL sebagai bagian dari usaha kecil juga menunjang kegiatan perekonomian di suatu daerah. Sehingga diperlukan peran pemerintah agar PKL tetap bisa mengembangkan usahanya tetapi juga tidak merusak fasilitas publik dalam hal ini trotoar (Puspitasari, 2010).

Melihat trotoar dengan segala atributnya membuat PKL yang memang dalam menjajakan barangnya tidak memiliki tempat yang pasti menjadi tertarik karena dirasa trotoar adalah tempat yang tepat dan cocok untuk digunakan sebagai tempat berjualan (Setiyawan et al, 2020). Keberadaan PKL memiliki sisi positif untuk menunjang perekonomian di suatu daerah namun juga memiliki sisi negatif karena keberadaannya merusak fasilitas ruang publik dan mengganggu pejalan

kaki, oleh karena itu peran pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi terbaik agar tidak terjadi *trade off* antara pejalan kaki dan juga PKL.

Penyalahgunaan Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penurunan pelayanan fasilitas pejalan kaki yakni trotoar disebabkan oleh adanya penyalahgunaan trotoar sebagai lahan parkir dan tempat berjualan para PKL yang mengurangi rasa aman dan nyaman dari para pejalan kaki (Winaya, 2010). Penyalahgunaan trotoar dilakukan oleh para PKL semata-mata karena tidak tersedianya fasilitas publik lain yang memugkinkan untuk para PKL berdagang, sehingga seminim mungkin fasilitas yang ada di trotoar tidak menurunkan niat para PKL untuk tetap berjualan di area tersebut (Setiyawan et al, 2020). Sumber Rahayu (2018) menjelaskan bahwa penyalahgunaan trotar oleh PKL memang terjadi, hal ini disebabkan minimnya pejalan kaki yang menggunakan fasilitas publik ini sehingga para PKL merasa sayang jika trotoar terlihat sepi dan tidak digunakan.

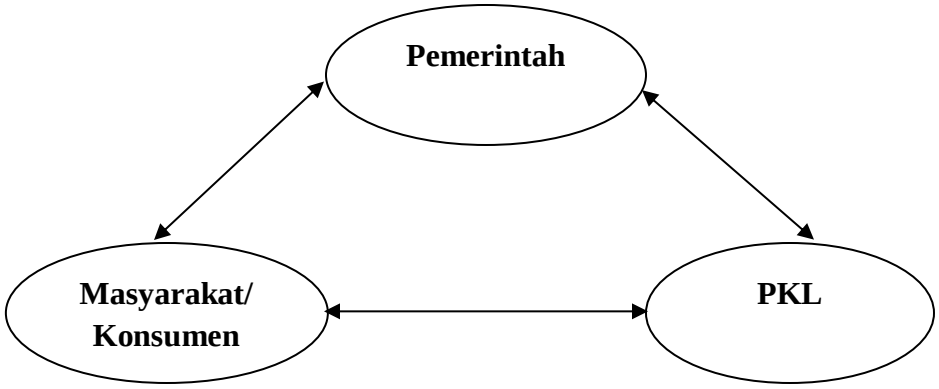
Selain alasan-alasan di atas Dinarjati Eka Puspitasari (2010) menyatakan keputusan dilematis PKL yang merugikan pejalan kaki karena menjajakan dagangannya di trotoar menuntut pemerintah melakukan langkah kebijakan untuk mengatasi trade off antara pejalan kaki dan PKL. Ketidakmampuan membayarbiaya sewa ruko juga menjadi alasan bagi 57,1% PKL berjualan di sepanjang trotoar (Bakri et al, 2013).

Relokasi PKL memberikan dampak yang positif untuk kenyamanan berdagang namun tmemberikan dampak negatif terhadap turunnya pendapatan para PKL selain itu kewajiban untuk membayar sewa tempat juga menjadi alasan PKL tetap enggan meninggalkan trotoar (Prasetya,2016). Berbeda dengan Prasetya (2016), Aji Wahyu Heriyanto (2012) menjelaskan bahwa keputusan merelokasi para PKL justru meningkatkan pendapatan para PKL dan meningkatkan kenyamanan namun pemberian fasilitas yang tidak lengkap masih menghambat kegiatan para PKL.

METODE

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus di depan Kampus UKSW Kota Salatiga. Sampel yang kami teliti adalah tiga pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan didepan kawasan kampus UKSW, yaitu pedagang Soto, penjual leker, dan penjual mie ayam Pak No. Data yang digunakan adalah data primer, yang dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Wawancara dilakukan selama kurang lebih 90 menit kemudian hasil wawancara disusun dalam bentuk rekaman wawancara

tertulis. Selanjutnya, data dikelompokkan dan dianalisis secara tematik. Metode ini dipakai untuk dapat mengetahui dampak ekonomi, meliputi pendapatan pedagang kaki lima setelah tidak berjulan didepan kawasan kampus UKSW Salatiga.



Ket : Pemerintah – PKL = Ketertiban PKL
PKL – Pemerintah = Informasi yang jelas
Mayarakat – Pemerintah = Penyediaan Fasilitas, Penjagaan Fasilitas
Pemerintah – Masyarakat = Menjaga fasilitas yang berada di trotoar
Masyarakat/Konsumen – PKL = Penawaran dari PKL atas barang yang dijual belikan
PKL – Masyarakat/Konsumen = Ingin tetap pendapatannya.

TEMUAN PENELITIAN

Dari hasil penelitian, para PKL yang berjualan di sepanjang trotoar di depan kawasan Kampus UKSW sudah melakukan aktivitas berjualan dari 21 tahun yang lalu. 2 PKL menyatakan sudah mulai berjualan dari tahun 1997. Sedangkan satu PKL sudah berjualan selama 35 tahun.

Para PKL tersebut sudah cukup lama menempati trotoar tesebut akan tetapi pada tahun 2017 para PKL tersebut harus menerima bahwa tidak dapat lagi berjualan di sepanjang trotoar. Pemerintah juga tidak memberikan tempat relokasi bagi para PKL. Dan para PKL juga mengatakan bahwa pemerintah memberitahukan informasi akan tetapi dalam penyampaian informasinya terlalu mendadak, Tidak adanya relokasi membuat PKL kebingungan mencari tempat berjualan. Tetapi, dengan berjalannya waktu, Para PKL dapat menemukan tempat berjualan, seperti di wilayah belakang kampus UKSW dan didepan SMAN 1 Salatiga, meskipun demikian ada beberapa PKL yang harus berjualan di sekitar rumah dan ada yang bahkan memutuskan untuk tidak lagi berjualan.

Disisi lain dengan berpindahnya tempat berjualan, para PKL pun merasakan perbedaan pendapatan dan pelanggan. Mereka mengatakan bahwa pendapatannya sekitar berkurang 20 persen dan ada yang sampai 30 persen setelah berpindah ke tempat yang baru. Para PKL pun tidak terlalu banyak melakukan strategi untuk mengantisipasi situasi tersebut hanya menempelkan informasi bahwa mereka sudah mengandalkan informasi mulut ke mulut.

Tanggapan para PKL berbeda-beda terhadap trotoar yang baru dibangun tersebut. Jika pedagang soto merasa trotoar baru tersebut sudah bagus dan memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarganya untuk berjalan-jalan, tidak demikian dengan PKL yang lain. Pembangunan trotoar oleh Pemerintah Salatiga disepanjang trotoar dirasa tidak memberikan manfaat bagi pedagang mie ayam dan penjual leker. Berikut pendapat pedagang mie ayam terkait trotoar yang baru dibangun tersebut. Manfaat yang mereka inginkan adalah menjadi ruang terbuka, trotoar lebih leluasa dan tidak disalahgunakan oleh pemuda.

> *"Ya gimana Mbak udah programnya pemerintah, Saya ya legowo aja. Cuman saya kok kurang suka ya mbak soalnya malah cuman buat nongkrong anak-anak remaja itu. Motornya sampai dinaikkan ke trotoar itukan sama aja yo opo yo mbak gak apik lah mbak."* (Pak Paino, 10 Juli 2018, Grogol, Salatiga)

Pedagang leker juga mengutarakan komentar yang mirip dengan komentar pedagang mie ayam. Intinya, trotoar itu malah disalahgunakan oleh anak-anak muda yang suka duduk-duduk di pinggir jalan, aktivitasnya pun kurang baik, sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik

> *"Kalo saya lihatnya kok rame ya mbak, lampunya kebanyakan, itu yang bunder-bunder batu itu ya banyakmen kok saya lihatnya terlalu rame malah gur (Cuma) dipake buat nongkrong anak-anak nakal kalo malam itu to saya lihatnya, yang lewat juga gak banyak-banyak banget, bikin jalane tambah sempit jadi sering macet, apalagi anak saya bilang kalau banyak yang mabuk itu to mbak kan malah gak baik ya."* (Pak Paijo, 12 Juli 2018, Kemiri, Salatiga)

Pembangunan trotoar yang dibangun pemerintah salatiga juga diapresiasi dan diterima secara sukarela oleh PKL tetapi ada juga PKL yang tidak mengapresiasi pembangunan trotoar yang dilakukan oleh pemerintah. *"Supaya mempermudah pejalan kaki si mas, seperti sekarang kan sudah banyak dilewati pejaln kaki, saya juga lihat makin rapi mas trotoarnya".*

Para PKL juga mempunyai beberapa harapan yang ingin disampaikan oleh pihak pemerintah setempat, para PKL ingin diberikan tempat relokasi,modal dan pemberitahuan yang jelas mengenai penggusuran sehingga para PKL masih bisa melanjutkan aktivitas berjualan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para PKL juga ingin adanya pemeliharaan trotoar agar trotoar selalu terlihat bersih

dan indah. *"Ya harapan saya si mas,dikasih midal dari pemerintah buat nambah-nambah biaya sewa", "Ya enak buat semuane lah mbak, gada yang dirugikan. Apalagi trotoar itu harusnya diawasi mbak biar hak cepat rusak juga", " Ya kalo saya gapapa digusur suruh pindah tapi yo ada pemberitahuan yang jelas, dikumpulin semua. Kalo kemarin kan engga, cuman dibilang dikasih waktu 1,5 bulan buat cari tempat. Baik lagi dikasih tempat itu di dekat trotoar ada tempat buat jualan kan enak."*

Dari penelitian yang kami lakukan terhadap konsumen mengenai pengaruh yang mereka rasakan setelah melihat para PKL tidak berjualan lagi ditrotoar adalah mereka tidak merasakan kesusahan dalam mencari makan, karena mahasiswa masih dapat mencari makan di kantin UKSW atau dibelakang kampus. *"Enggak susah, karena dibelakan kampus juga ada", "Kalau menurut saya sih tidak berpengaruh, karena lebih sering makan di café rindang (dalam kampus)", "Tidak terlalu susah, soalnya di belakang kampus ada jajanan juga yang didepan pindah kebelakang sebagian", "Iya lumayan juga mas, sekarang kalau mau cari mkan biasanya di cafetaria atau rindang."*

Tapi disisi lain mereka merasa peduli dengan para PKL yang tidak dapat berjualan lagi didepan kampus UKSW tetapi para konsumen juga menyadari bahwa apa yang dilakukan para PKL untuk berjualan disepanjang trotoar adalah tindakan yang salah. *"Ada, tetapi untuk kepentingan bersama lebih baik para penjual dipindahkan agar trotoar salatiga terlihat lebih rapi dan kampus UKSW tidak tertutup oleh para pedagang", "Ada, seharusnya dinas terkait juga harus memberikan solusi dengan adanya pembangunan trotoar untuk para penjual karena beberapa penjual sudah berjualan selama bertahun-tahun", "Kalau peduli ada, kasihan juga, akan tetapi untuk kepentingan bersama lebih baik para penjual dipindahkan di lahan yang sudah disediakan, agar trotoar salatiga terlihat lebih rapi dan berfungsi sebagaimana mestinya trotoar", "Iya kepikiran juga sih, nanti mereka pindah jualan dimana gitu"*

Konsumen juga setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah salatiga mengenai perbaikan trotor walupun akan berdampak pada para PKL sendiri yang akan kehilangan tempat berjualannya. Karena fungsi asli dari trotoar sendiri adalah diperuntungkan bagi para pejalan kaki bukan bagi para pedagang kaki lima yang berjualan. Dengan dibangunnya trotoar sendiri para konsumen juga merasa lebih luas dan nyaman untuk berjalan kaki disepanjang trotoar. *"Lebih leluasa dan lebih nyaman", "setelah pembangunan pejalan kaki lebih nyaman untuk berjalan di area pedestrian", "lebih leluasa lebar juga buat pejalan yg lain tidak msuk ke jln dan lebih nyaman", "Senang mas, bedanya sekarang lebih bersih, nyaman sama ada lampunya kuga jadi lebih menarik gitu."* Dari konsumen juga mempunyai saran kepada pemerintah salatiga untuk memberikan tempat relokasi

bagi para PKL yang tidak dapat lagi melakukan aktivitas berjualan ditrotoar agar para PKL tersebut tidak kehilangan mata pencahariannya ataupun merasa dirugikan.

Kami juga melihat permasalahan ini dari sudut pandang pemerintah yang dalam tulisan ini kami mengambil sampel dari 4 anggota satpol PP yang namanya telah kami samarkan. Ada beberapa informasi yang kami peroleh ketika kami melakukan wawancara kepada keempat responden ini di waktu dan tempat yang berbeda. Kami mencoba mencari informasi mengenai dasar mereka melakukan penggusuran kepada para PKL di depan kampus UKSW. Ada 2 alasan yang kami temukan. Pertama karena kewajiban yang harus dilakukan sebagai aparatur pemerintah dalam hal ini satpol PP dan yang kedua murni karena ingin melihat Kota Salatiga lebih bersih dan rapi. 3 dari 4 satpol PP yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka melakukan penggusuran PKL di depan kampus UKSW hanya karena kewajiban mereka sebagai satpol PP bukan murni karena ingin memperbaiki wajah Kota Salatiga. “Ya, nek aku pribadi ga begitu memperhatikan jane mbak, wong ya selama iki diolehke. La mergo meh digawe trotoar e makane di kon do lungo. Disuruh nggusur ya teko digusur mbak wong tugas.” “Ya kalau saya apa yang disuruh aja mbak dilakukan.” “Ya kerjaannya emang gusur-gusur mbak, mau gamau yaudah dilakukan saja” Sedangkan hanya 1 orang yang memiliki alasan kedua. “Ya kan biar bersih juga mbak, lebih longgar enak dipandang mata. Jadi ya kadang seneng juga liat tempat yang digusur jadi lebih indah, cuman ya itu kadang kan tetep ada ga teganya.”

Dari informasi di atas sesuai dapat dilihat bahwa informasi-informasi ini sesuai dengan teori dari Paul Ricoeur bahwa ada 2 alasan mengapa seseorang melakukan sesuatu, yang pertama karena kemauan dari dalam diri sendiri dan yang kedua adalah melakukan karena merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Dari narasumber yang diwawancarai kami dapat menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya mereka tidak menginginkan penggusuran itu terjadi. Tidak ada keinginan dari dalam diri bahwa mereka melakukan penggusuran agar Kota Salatiga dapat terlihat bersih dan cantik. Melainkan karena hal ini adalah kewajiban yang harus dilakukan.

Ketika kami mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pemerintah yang dalam penelitian ini diwakili oleh satpol PP, kami menemukan beberapa fakta yang menarik. Harapan semua satpol PP kepada para PKL adalah kedisiplinan PKL untuk sadardengan tempat yang digunakan untuk berjualan, sehingga tidak perlu dilakukan penggusuran. Kepada pemerintah kota sendiri, para satpol PP menginginkan ketegasan dari awal, kontrol terhadap suatu fasilitas publik di Kota Salatiga ini.

"Intinya gini mbak kami maunya ya nek ga dibolehin jualan di trotoar mbok ya nggugu, jangan jualan di trotoar. Seringnya tu saya sedih sendiri mbak, saya bilang mending pindah sendiri aja pak, saya meh gusur malah ga tega. Tapi ya gimana pemerintah kurang tegas juga, mereka udah jualan 15 tahun lebih di trotoar ya baru di tidaknya sekarang kan kacau jadinya." (Sdr. Parjo, 17 Juli 2018, Ngentak, Salatiga)

PEMBAHASAN

Ada perbedaan dari hasil yang telah diperoleh dengan penelitian terdahulu dari Heriyanto, 2012. Dalam hal perubahan pendapatan ternyata dari hasil yang diperoleh keseluruhan pedagang kaki lima yang kami wawancarai mengalami penurunan pendapatan mulai dari 20%-30%. Sedangkan dari penelitian terdahulu penggusuran PKL di kawasan Simpang Lima Semarang memberi pengaruh kenaikan pendapatan kepada para PKL. Sementara disandingkan dengan penelitian Dinarjati Eka Puspitasari (2009) dan Suryantika Sinaga (2004) terdapat kesamaan, bahkan berdagang di kaki lima mampu menghasilkan pendapatan yang memadai sehingga mereka enggan untuk direlokasi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan perubahan pendapatan di kedua tempat ini, yang pertama adalah adanya relokasi ketika terjadi penggusuran di kawasan Simpang Lima Semarang sedangkan di depan Kampus UKSW pemerintah tidak melakukan relokasi kepada para PKL. Dari penelitian terdahulu dapat kita lihat bahwa para PKL di relokasi ke tempat yang sama strategis dan nyaman dibandingkan di tempat yang lama. Ada penambahan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu petak-petak tempat bagi tiap-tiap pedagang, adanya toilet umum bagi para penjual maupun pemberi serta perbaikan berbagai fasilitas pendukung. Sedangkan di depan kampus UKSW tidak dilakukan relokasi oleh pemerintah. Para PKL hanya diberikan waktu sendiri dan hanya mengandalkan kemampuan sendiri untuk mencari tempat yang strategis. Namun, ketiadaan ruang dan tempat yang pas membuat perbedaan tempat berjualan yang cukup berbeda. Dan kemudian membawa perubahan kepada pembeli, ongkos, dan banyaknya produksi. Tidak heran bila di depan kampus UKSW sebaliknya para PKL mengalami kemunduran hang tidak sedikit.

PENUTUP

Para pedagang kaki lima lebih memilih lokasi berjualan di ruang –ruang public seperti trotoar dikarenakan intensitas pengunjung yang tinggi dan mudah dicapai orang banyak. Tetapi para pedagang kaki lima ini tidak mempertimbankan

kepentingan serta kenyamanan penggunaaktivitas lain di tempat yang sama (trotoar). Dampak dari pembangunan trotoar di depan kampus UKSW yang dilakukan pemerintah, yang kemudian berimbas pada berpindahnya pedagang kaki lima yang dulunya berdagang di depan kampus UKSW, menyebabkan perubahan kondisi ekonomi bagi para pedagang kaki lima.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dimana kami mengambil tiga sampel, yaitu pedagang soto, mie ayam serta leker. Ditemukan bahwa dampak relokasi para pedagang kaki lima menyebabkan adanya penurunan pendapatan bagi para pedagang kaki lima tersebut. Bahkan berkurangnya pendapatan tersebut dapat menyentuh angka 30%. Tidak jarang juga ditemukan pedagang kaki lima lainnya lebih memilih untuk kembali kekampung halamannya daripada mencari tempat lain di sekitar kampus untuk kembali berjualan. Relokasi ini memberikan kendala-kendala bagi para pedagang kaki lima, seperti sarana prasarana yang tidak terpenuhi, kurangnya fasilitas yang memadai seperti lahan parkir yang kurang luas, dan perbedaan pengunjung yang tidak sama seperti saat berjualan di depan kampus UKSW. Pemerintah setempat sudah seharusnya ikut andil dan memberi perhatian lebih dalam mengatasi kendala-kendala yang ada. Seharusnya pemerintah dapat membantu dengan memfasilitasi para pedagang kaki lima dengan menyediakan tempat yang strategis dan nyaman untuk berjualan. Juga mengevaluasi kembali tataruang Kota Salatiga, sehingga terdapat tempat/lahan bagi para pedagang kaki lima untuk berjualan. Bukan hanya sekedar membangun trotoar tanpa mempertimbangkan bagaimana nasib para pedagang kaki lima kedepannya

REFERENSI

Ambarwati, Lasmini, and Amelia K. Indriastuti. 2006. "Pengaruh Kegiatan Lain Pada Trotoar Terhadap Tingkat Pelayanan Trotoar Dan Karakteristik Berjalan Pejalan Kaki: Studi Kasus di Pusat Kota Malang." *Jurnal Transportasi Vol 6 No. 1* 51-62.

Bakri, Isthaslama, Buchori Asyik, and Rahma Kurnia Sri Utami. 2013. "Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima Jalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung." Bandar Lampung.

Heriyanto, Aji Wahyu. 2012. "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang." *Economics Development Analysis Journal 1 (2)* 1-7.

Prasetya, Mochammad Aringga, and Luluk Fauziah. 2016. "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo." *JKMP Vol. 4, No. 2* 134-149.

Puspitasari, Dinarjati Eka. 2010. "Penataan Pedagag Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman." *Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3* 588-606.

Rahayu, Sumber, and Retno Widjajanti. 2018. "Pengembangan Trotoar Sebagai Jalur Pejalan Kaki Pada Koridor Jalan Utama Pusat Kota Wonogiri (Studi Kasus : Trotoar Jl. A. Yani, Jl. Sudirman Dan Jl. Pemuda)." *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota Vol. 14 No. 1* 73-82.

Ricoueur, P. 1994. *Freedom and Nature : The voluntary and involuntary (Translated by E.V. Kohak).* USA: Northwestern University Press.

Setiyawan, Alfanadi Agung, Suzanna Ratih Sari, and Agung Budi Sardjono. 2020. "Persepsi Atribut Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Trotoar Pandanaran." *Jurnal Teknik Arsitektur Vol. 5 Issue 2* 287-296.

Sinaga, Suryantika. 2004. *Dampak Sosial Kebijakan Pemda DKI Jakarta Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima di Lokasi Binaan Studi Kasus di Lokasi Binaan Paal Merah Jakarta Pusat.* Thesis, Jakarta: Universitas Indonesia.

Winaya, Putu Preantjaya. 2010. "Analisis Fasilitas Pejalan Kaki Pada Ruas Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali." *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol.14 No. 1* 82-95.